

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum: Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006).

Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013).

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelse Pidana, Teori- Teori Pemidanaan & Batas- Batas Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafika, 2002).

Agus Kasiyanto, *Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018).

Agustin E. Ferraro, "Book Review-Kelsen's Highest Moral Ideal," *German Law Journal* No. 10 (2002).

Andi Hamzah, *Asas- Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta,, 2001).

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005)..

Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme)*. (Bandung : Binacipta, Binacipta, 1996).

B. Bosu, *Sendi-sendi Kriminologi*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982).

Bambang Waluyo *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Barda nawawi arief, *bunga rampai kebijakan hukum pidana* (bandung: citra aditya bakti, 1998).

C. S. T. Kansil, dkk, *Tindak Pidana Dalam Undang-undang Nasional*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009)..

Chaerudin DKK, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008).

Chaerudin DKK, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana*

Korupsi, (Bandung: Refika Aditama, 2008).

Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: Media Pustaka, 2009).

Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. (Yogyakarta: Liberty, 1988).

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010).

Dr. Muhammad Yusuf, *Miskinkan Koruptor, Pembuktian Terbalik Solusi Jitu Yang Terabaikan*, (Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2013).

Dwi Adiyah Pratiwi, *Maladministrasi Pangkal Korupsi*, (Jakarta: Ombudsman.go.id, 2020).

Dwiyanto, Agus, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

Elly Setyadi dan Usman Kholip, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: Kencana, 2011).

Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014).

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2002).

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Refika Aditama 2011).

Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008)

- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* :Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Fathurahmanjamil, *dkk korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam prespektif nukum dan moral islam, dalam menyikap Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme di indonesia* (yogyakarta: aditya media, 1999).
- Fernandes Edy Syahputra Silaban, L. Erwina, dan Mahmud Mulyadi, Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pengaturan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia, *Jurnal Mahupiki*, (2012).
- G.W. Bawengan, *Pengantar Psychologi Kriminil*, (Jakarta : Pradnya Paramita 1977).
- Ghuffan, Ahmad, dan Sudarsono. *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).
- H. M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2009).
- H. Moh Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- H. Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012).
- Hanafi, *Asas - Asas Hukum Pidana Islam*, cet. IV, (Jakarta: BulanmBintang, 1990).
- Harahap, Yahya, Pembahasan, permasalahan dan penerapan KUHP Jilid I, (Jakarta : Pustaka Kartini 1993).
- Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990).
- I Ketut Adi Purnama, 2018, *Hukum Kepolisian*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2018).
- I.P.M Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).
- J. Remmelink, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).
- Joseph Raz, p. dalam Syaiful Ahmad Dinar, *KPK & Korupsi (Dalam Studi Kasus)*. Cintya Press, Jakarta : 2012,
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan*, (Jakarta: KPK, 2009).
- Komisi Pemberantasann Korupsi, *memahami untuk Membasmi Buku Panduan*

- untu Memahami Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: KPK, 2006).
- Kumorotomo, Wahyu. *Sistem Informasi Manajemen dalam Organisasi Organisasi Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994).
- Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011).
- Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori Kebijakan dan Implimentasi*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006).
- Lijan Poltak Sinambela. *Reformasi Hukum Pidana: Teori, Kebijakan dan Implimentasi*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006).
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, (Bandung: Alumni, 2012).
- M. sholehuddin, *Tindak Pidana Perbankan*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997)
- Made Gde Subha Karma Resen, *Konsep, Konsepsi dan Miskonsepsi Makna Pungutan, Pungutan Sah, dan Pungutan Liar Terjadi di Desa Pakraman*.Seminar Nasional Hukum dan Ilmu Sosial Ke-2. (2018).
- Madjloes,1987, *Perlakuan Hukum Pidana Terhadap Pegawai Negeri*, (Jakarta : Prima Karya, 1987).
- Moenir, HAS., *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Edisi V, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001).
- Moh. Mahfud MD, , *Politik Hukum di Indonesia*,(Jakarta: Pustaka – LP3ES, 1998) ,
- Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi: Implimentasi Hukum Pidana Sebagai Isntrumen dalam Mewujudkan Tujuan Negara*, (Malang: In-TRANS Publishing, 2008).
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian* (Jakarta : PT Grasindo, 1994).
- Nasrullah, M,Ag, *Teori dan Asas Pidana Menakar Kontribusi Hukum Islam terhadap Pemberantasan Tindak Korupsi diIndonesia*, (Banda Aceh: Bandar Publishing). 2019).
- Ninie Suparni dan Baringin Sianturi, *Bunga Rampai Korupsi, Gratifikasi, dan Suap*, Jakarta: Miswar, 2011,
- Nurul Irfan Muhammad., *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009).

- P. A. F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013).
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2013).
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013).
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Peter Salim dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer.Modern English*. (Press Jakarta:1991.
- Poltak Sinambela, Lijan, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006).
- Prof. Dr. Jimly Ashidiqy., *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing, 2009).
- Prof. Dr. Satjipto Rahadjo, S.H., *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing, 2009).
- Prof. Sudarto, S.H., *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Penerbit P.T. ALUMNI, Bandung, 2010).
- Pudi Rahardi, *Profesionalisme dan Reformasi POLRI* (Surabaya : Laksbang Mediatama,m 2007).
- Putusan Nomor 10 /PID.SUS-TPK/2020 PN Mks.
- R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP (Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad)*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Ed, 2, Cet, 2, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001) ,
- Rohim, SH., *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : Pena Multi Media,2008).
- Romli Atmasasmita, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016).
- Romli Atmasasmita, *Sekitar Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, CV. (Bandung: Mandar Maju, 2004).
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007).
- Romly Atmasasmita & Kodrat Wibowo, *Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: renadamedia,, 2016).

- S. R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3. (Jakarta: Stora Grafika, 2002).
- Sadjijono, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance* (Yogyakarta : Laksbang, 2005).
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 1993).
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum; Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).
- Soerjono Soekanto, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, Penerbit UI Press, 2018).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pt. Sinar Grafika, 2011).
- Sudirman said dan nizar suhendra, *korupsi dan masyarakat indonesia dalam mencuri uang rakyat, 16 kajian korupsi di indonesia, dari puncak sampai dasar* (jakarta: yayaan aksara, 20011).
- Suhendar, SH. MH., *Konsep Kerugian Keuangan Negara, Pendekatan Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara dan Pidana Khusus Korupsi*, (Malang: Setara Press, 2015).
- Syaiful Ahmad Dinar, *KPK & Korupsi*, Cintya Press, Jakarta : 2012,
- Syamsir Alam, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar (Studi Kasus di Kabupaten Takalar)*. Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, (2017).
- Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum* (Yogyakarta: Media Perkasa, 2013).
- Th sumartana, *Etika dan penanggulangan korupsi kolusi dan nepotisme di era reformasi*, (yogyakarta: aditya media, 1999).
- Theo Hujibers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 1995) hlm.70.
- Topo Santoso, *Urgensi Pembenahan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Mewujudkan Good Governance*, Puslitbang Badan Pembinaan Hukum Nasional, (Jakarta: , Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, 2011).
- Topo Santoso, *Urgensi Pembenahan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Mewujudkan Good Governance*, Puslitbang Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Jakarta, (2011).

Topo Santoso, Urgensi Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Mewujudkan Good Governance, Puslitbang Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Jakarta, (2011).

Utomo Hadi Warsito, *Hukum Kepolisian Di Indonesia* (Jakarta : Restasi Pustaka, 2005).

Wahyudi Setiyawan, 2018, *Efektivitas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar*, Februari, 2018,

Wijayanto, dkk, Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010).

Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Pustaka Media, 2016).

Zulkarnain Umar, —Jurnal Analisis Dan Kebijakan Publik I (2017).

ARTIKEL JURNAL:

Agustin E. Ferraro, “Book Review-Kelsen’s Highest Moral Ideal,” *German Law Journal* No. 10 (2002).

Dwi Joko Harianto, jurnal analisis yuridis tentang tindak pidana pungutan liar terhadap mobil angkutan barang di jalan raya berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, fakultas hukum universitas islam kalimantan, kalimantan: 2020, hal. 8

Fernandes Edy Syahputra Silaban, L. Erwina, dan Mahmud Mulyadi, Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pengaturan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia, *Jurnal Mahupiki*, (2012).

I Made Aditya Sastra Nugraha dan I Gede Yusa, penanganan perkara pungli dalam jabatan melalui pendekatan ke-ekonomian hukum (economic approach to law). *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 14. No. 2, (2018).

Juli Antoro Hutapea, *Perbuatan Pungutan Liar (PUNGLI) Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Vol. 1, No. 1, (2016).

Mulya Hakim Solichin, Alvi Syahrin, Mahmud Mulyadi, dan M. Ekaputra, Penegakan Hukum Dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 (Studi Kasus di Polres Langkat). *USU Law Journal*, Vol. 6. No. 1 (Januari 2018).

Mulya Hakim Solichin, Alvi Syahrin, Mahmud Mulyadi, dan M. Ekaputra, Penegakan Hukum terhadap Praktek Pungutan Liar di Jalan Raya oleh Masyarakat Dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 (Studi Kasus di Polres Langkat). *USU Law Journal*, Vol. 6.

No. 1 (2018) 109 – 121,

Mulya Hakim Solichin, Alvi Syahrin, Mahmud Mulyadi, dan M. Ekaputra, Penegakan Hukum terhadap Praktek Pungutan Liar di Jalan Raya oleh Masyarakat Dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 (Studi Kasus di Polres Langkat). *USU Law Journal*, Vol. 6. No. 1 (Januari 2018)

Qurratul ‘Aini Wara Hastuti, Infaq Tidak Dapat Dikategorikan sebagai Pungutan Liar, *Ziswaf*, Vol. 3, No. 1, (2016).

Qurratul ‘Aini Wara Hastuti, Infaq Tidak Dapat Dikategorikan sebagai Pungutan Liar, *Ziswaf*, Vol. 3, No. 1, Juni (2016).

Sudarman, *Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Pada Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Agam Oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar*, Jurnal ISSN Vol. I, No 2, (2018).

Trias Palupi Kurnianingrum, 2016, *Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli*, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Majalah Info Singkat Hukum kajian singkat Terhadap isu aktual dan strategis Vol. III No 20/II/P3DI/Oktober/2016

Vita Nurul Fathya, *Upaya Reformasi Birokrasi Melalui Area Perubahan Mental Aparatur Untuk Memberantas Praktik Pungli Yang Dilakukan Oleh PNS*, Vol. 4, No. 1, April, (2018).

Warfian Saputra, Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Korupsi Birokrasi pada Sektor Pelayanan Publik, *Wajah Hukum* Vol. 1 No. 1, Oktober 2017,

Warfian Saputra, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Korupsi Birokrasi pada Sektor Pelayanan Publik*, Wajah Hukum Volume 1 Nomor 1, (2017).

Wempie Jh. Kumendong, *Kajian Hukum Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Menurut Perpres RI No. 87 Tahun 2016*, Vol. V, No. 2, (2017).

Wempie Jh. Kumendong, *Kajian Hukum Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Menurut Perpres RI No. 87 Tahun 2016*, Vol. V, No. 2, Maret-April, 2017,

Zulkarnain Umar, —Jurnal Analisis Dan Kebijakan Publik I (2017).

WEBSITE

IDN Times, Mencuat lagi di Priok, Ini Sejarah Pungli dan Premanisme di Indonesia, [idntimes.com/news/](https://www.idntimes.com/news/) diakses pada tanggal 26 Oktober 2022 Pukul 22:15 WIB

<http://kbbi.kata.web.id/pungutan/>, diakses pada Tanggal 6 Juli 2022

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf pada hari 3 Sabtu, 26 September 2022 pada pukul 13.05

[https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/diakses 12 Novemer 202](https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/diakses%2012%20Novemer%202022).

https://id.wikipedia.org/wiki/Pungutan_liar, diakses pada tanggal 30 Juli 2022.

<https://nasional.tempo.co/read/828728/kpk-laporan-pungli-paling-banyak-terkait-pelayanan-publik> diakses pada 6 juli 2022.

https://www.researchgate.net/publication/332805193_Pemberantasan_Pungutan_Liar_pada_Pelayanan_Publik_dari_Perspektif_Sosiologi_Hukum diakses Pada Sabtu 12 November 2022.

Iftitah Nurul Laily, 2022, Memahami Pungli, Penyebab, Perkembangan, dan Dasar Hukum penindakanya , Ekonopedia: Katadata.co.id Terbit Jum'at, 27/05/2022, diakses tanggal 25 Oktober 2021, pukul 19.10 WIB

Imron Rosyadi, "Penegakan Hukum Dalam Masyarakat Indonesia". *Jurnal Sains dan Inovasi* III(2)77-82, (Online). (<http://h:new%20fol/materi/02/1-imron1>), diakses 12 November 2022.

Indraza marzuki Rais, 2021, Ombudsman: tahun ini, aduan pungli di layanan publik masih tinggi. Ombudsman.go.id/news/r Terbit Selasa, 07/02/2021, diakses tanggal 25 Oktober 2021, pukul 20.03 WIB

Majalah Gatra. Pungli di Tengah Masyarakat. sumber <https://arsip.gatra.com/2004-06-25/> artikel.php?id=39966. diakses tanggal 9 Agustus 2022

Rif'ah Roihanah "Masalah Penegakan Hukum Di Indonesia" *Jurnal Hukum*,(Online). (<http://gbkp.or.id/index.php/208-gbkep/bacaanpopuler/319-masalahpenegakan-hukum-di-indonesia>), diakses 12 November 2022.

Wahyu Ramadhani, "Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik". *Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 2, (Online) (<http://gbkp.or.id/98/penegakan-hukum-dalam-menanggulangi-pungutan-liar-terhadap-pelayanan-publik>), diakses 12 Novmber 2022.